

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, Oleh karena itu perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan nasional sebagai peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan. Dari situasi tersebut maka tidak lepas dari sumber pendapatan yang digunakan sebagai sumber pendanaan dari setiap program kerja guna mengoptimalkan pembangunan di negeri ini. Pajak merupakan pendapatan terbesar suatu negara selain itu pajak juga sumber utama pembangunan nasional dan belanja negara. Dana atau biaya untuk negara semakin meningkat seiring berjalannya waktu tergantung pada kebutuhan, begitu pentingnya pajak bagi negara maka pemerintah harus bekerja lebih keras atau berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan pajak agar pemerintah tidak ketergantungan pada bantuan atau pinjaman luar negeri karena dengan pajak pembangunan negara dapat berjalan lancar selanjutnya semua masyarakat harus membayar, mematuhi komponen yang telah dibuat dirjen pajak dan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah.

Pentingnya pajak dalam pendapatan negara digunakan untuk pembiayaan belanja negara dan pembangunan nasional Indonesia, maka masyarakat harus ikut berperan dalam kepentingan ini yaitu dengan melaksanakan pajak atau membayar pajak tepat waktu, para wajib pajak juga

harus berusaha untuk memaksimalkan pendapatan negara bukan hanya menaruh kepercayaan kepada Dirjen Pajak maupun pegawai pajak. Kemauan semua masyarakat dan kepatuhan masyarakat membayar pajak juga berperan penting untuk meningkatkan pendapatan dan memaksimalkan agar pembangunan yang direncanakan tercapai tanpa ada hambatan. Pendapatan pajak akan menambah pendapatan negara untuk meningkatkan kesejahteraan pembangunan masyarakat. Pajak sebagai suatu kewajiban memberikan sebagian dari kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan tertentu bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung. Penerimaan pajak 2017 lebih baik dari tahun sebelumnya yaitu pencapaian 60% lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu hanya sekitar 58,4%, apabila masyarakat lebih tepat waktu untuk membayar pajak maka kenaikan itu akan semakin meningkat setiap tahunnya tetapi kebanyakan masyarakat desa itu sendiri kurang mengetahui apa gunanya atau fungsi pajak itu sendiri.

Pajak sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari yang dibagi menjadi beberapa macam misalnya pajak motor, pajak listrik, PBB. Pajak Bumi dan Bangunan segala sesuatu tentang pajak pun sudah di atur dalam Undang-Undang, jadi walaupun ada yang sungkan atau tidak mau membayar pajak pasti akan dikenakan sanksi. Pajak juga sangat penting untuk pembangunan infrastruktur semisal jalan, bendungan, irigasi dan lainnya, jadi tidak ada ruginya kita membayar pajak. Kesadaran besar yang perlu

ditanamkan kepada seluruh rakyat Indonesia agar patuh untuk membayar pajak. Fungsi pajak yang penting yaitu pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang terbesar, fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan ini biasa dikenal sebagai fungsi budgetair pajak. Fungsi budgetair pajak memegang peranan sangat penting di Indonesia, karena sekitar 70% pengeluaran Negara dibiayai oleh pajak termasuk Pajak Bumi dan Bangunan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tidak tepat waktu membayar Pajak Bumi dan Bangunan misalnya kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pegawai kepada wajib pajak serta sanksi perpajakan yang dianggap kecil atau sedikit oleh wajib pajak.

Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah. Kesadaran ini sangat penting karena ini ada pada diri kita sendiri untuk memotivasi kemauan agar segera membayar pajak tepat waktu atau sebelum tanggal jatuh tempo.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati/ dipatuhi, tidak melanggar norma perpajakan, Mardiasmo (2009). Sanksi ditujukan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan atau melakukan

pelanggaran berupa kecurangan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.

Kualitas pelayanan ketika membayar pajak menjadi salah satu indikator penilaian wajib pajak bumi dan bangunan dalam kesediannya membayar pajak. Perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpatokan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, namun pelayanan yang diberikan oleh pegawai pada wajib pajak bumi dan bangunan itu sangat berpengaruh kepada wajib pajak. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak bumi dan bangunan, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan atau pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi dan bangunan yang dibayarkan setiap tahunnya dan memiliki target penerimaan setiap tahun yang terus meningkat. Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota di masing-masing wilayah Indonesia telah mengupayakan berbagai cara untuk menarik perhatian masyarakat dalam membayar pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dengan sistem jemput bayar menggunakan layanan mobil keliling, membuka loket pembayaran di Kelurahan/Desa maupun Kecamatan, dan lain-lain. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan maksud agar masyarakat dapat memiliki kemauan membayar pajak sebelum

tanggal jatuh tempo pembayaran. Pembayaran PBB itu sendiri bisa dilakukan sendiri dengan dibayar dating ke bank atau secara online.

Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan memungut pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting, baik bagi negara maju maupun negara berkembang (Kurnia, 2010). Namun wajib pajak di desa Mlese kecamatan Gantiwarno kabupaten Klaten kesadaran dan kurangnya pelayanan tentang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan oleh wajib pajak, sebagian dari penduduknya berprofesi sebagai petani dan buruh sehingga membuat masyarakat kurang memiliki kesadaran akan pajak. Pemungutan pajak tersebut dilakukan oleh kelurahan kepada masyarakat atau warga setiap tahun, namun terkadang pemungutan tersebut tidak ditarik langsung oleh petugas sehingga terjadi penundaaan pembayaran PBB dan kurangnya kesadaran oleh wajib pajak, ada warga yang ingin membayarkan PBB tanpa menunggu petugas kelurahan yaitu langsung membayar ke Bank tetapi warga desa sabar menunggu pegawai kelurahan untuk pemungutan pajak bumi dan bangunan karena kebanyakan warga itu petani maka mereka kurang mengetahui bagaimana jika langsung membayar PBB. Pemerintah kabupaten Klaten telah memudahkan masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan yaitu dengan membayar ke Bank. Pelayanan ini mendekatkan masyarakat dengan tempat pembayarannya, namun warga desa Mlese masih membayarkan

pajaknya dengan petugas kelurahan karena warga desa masih tidak mau membayar ke bank dan kurang mengetahui cara pembayaran.

Berdasarkan kondisi yang telah dijelaskan diatas maka penulis melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH KESADARAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN” (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mlese Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian penting harus ada pada penulisan suatu karya ilmiah. Oleh karena itu peneliti sebelum melakukan penelitian harus mengetahui terlebih dahulu mengenai permasalahan yang ada. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, peneliti merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan ?
2. Apakah pelaksanaan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan ?
3. Apakah pelaksanaan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pada berbagai pihak, diantaranya adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pentingnya pengawasan terhadap bidang perpajakan di Indonesia, khususnya pajak bumi dan bangunan.
 - b. Penelitian ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan ilmu akuntansi khususnya akuntansi perpajakan pada bidang pajak bumi dan bangunan yang dapat menjadi media informasi untuk penelitian lebih lanjut.
 - c. Bagi Dinas Pendapatan Daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan mengenai perpajakan sehingga penerimaan pajak daerah dapat meningkat.

2. Manfaat Praktis

Bagi akademis penelitian ini dapat menambah wawasan para pembaca. Penelitian ini merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan akuntansi perpajakan. Oleh karena itu, bagi akademis dan pihak-pihak yang menginginkan penelitian sejenis hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan kajian teoritis dan sumber referensi tambahan.

E. Sistematika Penulisan

Dalam hasil penelitian ini, sistematika pembahasan terdiri atas lima bab masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktisi, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori, pengertian tentang kesadaran, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang memuat tentang variabel penelitian, definisi operasional, penentuan sampel, teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penyajian dan analisis data. Pada bab penelitian menyajikan dan menyelesaikan hasil pengumpulan serta analisis data, sekaligus merupakan jawaban atas hipotesis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian serta saran-saran yang dapat dijadikan masukan dari berbagai pihak berkepentingan.